



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Buano - Masohi

**LAPORAN
KINERJA
2018**



**Tim Penyusun Laporan Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2018**

Pengarah

**MUHAMMAD SUJOKO,ST
Plt. Kepala Dinas**

Penanggung Jawab

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

Anggota

Kata Pengantar

Perkembangan teknologi Informasi mendorong Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dalam Semangat Orang Hidup Basudara

Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah terus mengalami peningkatan terutama pada aktivitas layanan. Dinamika dari era digital ini juga telah menyebabkan terjadinya cara baru yang memanfaatkan perubahan teknologi komunikasi dan informasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan transformasi dalam memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.

Dalam rangka memperkuat ekonomi daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika fokus pada reformasi kebijakan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama yang terkait dengan DNA (Device/perangkat, Network/jaringan, Application/aplikasi). Hasil capaian pelaksanaan program-program tersebut, disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Kemkominfo.

Selain membuat kebijakan sektor TIK, Dinkominfo juga melaksanakan fungsi edukasi dalam melaksanakan program kebijakan untuk pengelolaan media informasi di daerah. Selain itu, juga berperan sebagai Government Public Relations dalam mendiseminasikan program-program pemerintah daerah dengan menyajikan informasi resmi dan akurat dari lintas sektor pemerintah sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami program-program pemerintah tersebut beserta hasil-hasilnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinkominfo Tahun 2018 ini, diharapkan dapat menjadi perwujudan dari upaya Dinkominfo dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin

LAPORAN KINERJA 2018

mendapatkan informasi terkait kinerja Dinkominfo. Melalui laporan kinerja ini pula, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja di lingkungan internal Dinkominfo.

Tim Penyusun Laporan Kinerja 2018
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah



Ringkasan Eksekutif



Untuk membantu Bupati Maluku Tengah dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta Bidang Persandian



Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah sebagai Jendela Indonesia Bagian Timur dengan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Diskominfo Tahun 2018 yang merupakan implementasi dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam menjawab VISI dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah sebagaimana di Amanatkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022.

Laporan Kinerja Diskominfo Tahun 2018 disusun untuk menyajikan informasi tentang capaian kinerja Diskominfo yang diperjanjikan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada para pimpinan dan stakeholders selama Tahun 2018. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017–2022 serta dokumen perencanaan turunannya.

Perjanjian Kinerja ini ditetapkan kedalam 2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) Indikator Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja Sasaran. Ikhtisar hasil evaluasi capaian kinerja tersebut diuraikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Ikhtisar Capaian Kinerja Kemkominfo Tahun 2017

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Tujuan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	1 Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	16,79	6,94	41,35
Sasaran Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	1.1 Presentase publikasi informasi melalui media online	15,59	15,29	98,11
	1.2 Presentase e-government yang terintegrasi	23,08	7,69	33,33
	1.3 Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	11,11	2,02	18,18
Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan	2 Predikat LAKIP*	A	A	100,00
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	2.1 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00

Kinerja Anggaran Tahun 2018

Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada TA 2018 adalah sebesar realisasi belanja dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.776.859.549,00 atau 104,40% dari target sebesar Rp.2.659.742.000,00. Belanja langsung sebesar Rp. 2.678.000.942,00 atau 92,91% dari target Rp.2.882.445.000,00 untuk lebih rinci dapat digambarkan pada tabel.3.1 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran		Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	0	0	0,00
2	BELANJA	5.542.187.000	5.454.860.491	98,42
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.659.742.000	2.776.859.549	104,40
2.1.1	Belanja Pegawai	2.659.742.000	2.776.859.549	104,40
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.882.445.000	2.678.000.942	92,91
2.2.1	Belanja Pegawai	113.120.000	110.420.000	97,61
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.353.987.000	2.170.810.942	92,22
2.2.3	Belanja Modal	415.338.000	396.770.000	95,53

BAB I

Pendahuluan

PHOTOGRAPH BY
The architectural city, which has been
designed as urban layout, should be
like a ladder, with each step forming
like a space with each ascending to
and so the top reaches an urban space
the urban landscape and every
width and become a space for a space
the architect trying to realize a goal.
The urban landscape in urban space is
the urban landscape for the urban space
and the urban landscape should be kept
on the urban landscape for the urban
space and urban landscape of a high
quality urban.

BAB I

Pendahuluan



Program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta Bidang Persandian berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV secara berjenjang



Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Maluku Tengah. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, bahwa dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Komunikasi dan Informatika
- e. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh bupati

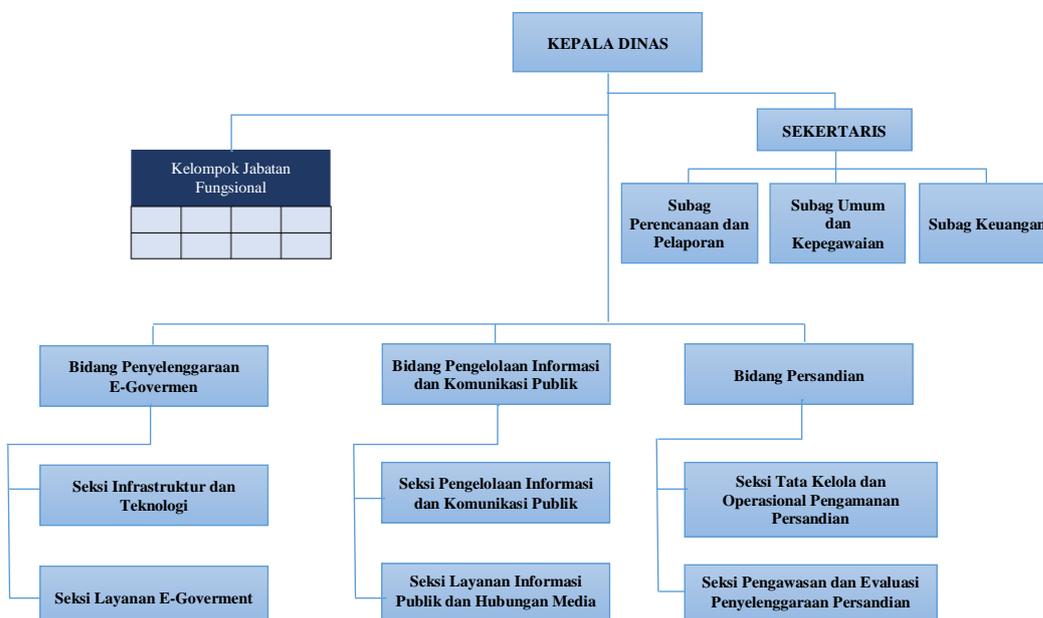
Adapun susunan organisasinya sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas

- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
 - c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
- a) Kepala Dinas
 - b) Sekretariat membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - c) Bidang Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik membawahi:
 - 1) Seksi Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik
 - 2) Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
 - d) Bidang Penyelenggaraan E-Goverment membawahi:
 - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - 2) Seksi Layanan E-Goverment
 - e) Bidang Persandian membawahi:
 - 1) Seksi Tata kelola dan operasional pengamanan persandian
 - 2) Seksi Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Maluku Tengah, diperlihatkan dalam bagan beriku ini:

Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Komunikasidan Informasi
Kabupaten Maluku Tengah



Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang komunikasi dan informatika dengan mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Komunikasi dan Informatika agar dapat berjalan optimal;
- b) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal;
- c) Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu;
- d) Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu;
- e) Bidang Persandian mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Bidang Persandian dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu

Tata Laksana Dinas Komunikasi Dan Informatika

1. Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu:

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;
- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;

- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.

2. Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

3. Prosedur Kerja Dinas:

Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk menyelenggarakan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika.

Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan pengelolaan, administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan program, penyusunan bahan pembinaan sistem informasi manajemen, penyusunan rencana strategis, dan pengumpulan bahan pengusulan program, bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi, bahan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup penyusunan rencana dan program dinas serta penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan lingkup perbendaharaan dan perlengkapan.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan pengelolaan administrasi keuangan, sistem akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan, penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan keuangan dan perlengkapan.

Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Usaha Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang prasarana dan sarana perhubungan, potensi dan permasalahan prasarana dan sarana, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang prasarana dan sarana, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Seksi Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Usaha Pos dan titipan kilat, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum Kelembagaan Usaha Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, penyiapan bahan teknis

operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media, pembinaan usaha di bidang Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media meliputi : penyusunan program dan kegiatan seksi, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media, menyusun potensi dan permasalahan lingkup seksi, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan kegiatan seksi, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang komunikasi dan informatika, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan usaha Penyelenggaraan E-Government, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Penyelenggaraan E-Government, potensi dan permasalahan bidang, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi kepada masyarakat, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan Infrastruktur dan Teknologi, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberi bimbingan teknis dan supervise di bidang Infrastruktur dan Teknologi, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Infrastruktur dan Teknologi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Seksi Layanan E-Government

Kepala Seksi Layanan E-Government kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan Layanan E-Government, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberi bimbingan teknis dan supervise di bidang Layanan E-Government, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Layanan E-

Government, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Bidang Persandian

Kepala Bidang Persandian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan usaha Penyelenggaraan Persandian, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Persandian, potensi dan permasalahan bidang, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi kepada masyarakat, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian

Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, pengolahan proses pengamanan informasi milik daerah, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghacuran informasi berkalsifikasi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelnggaran Persandian

Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelnggaran Persandian kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Penyelnggaran Persandian, meliputi: penyusunan rencana kegiatan, penyiapan instrument, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dibebankan pada 14 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b = 1 jabatan, Eselon III/a = 1 jabatan, Eselon III/b= 3 jabatan, Eselon IV/a = 9 jabatan

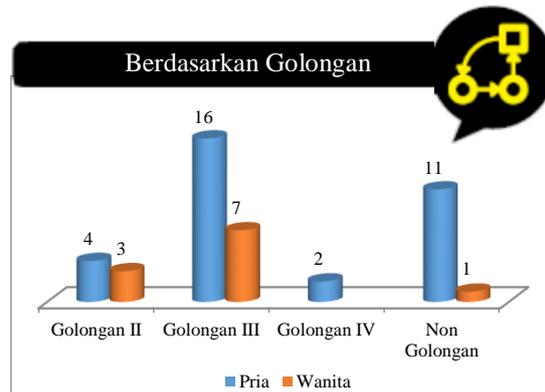
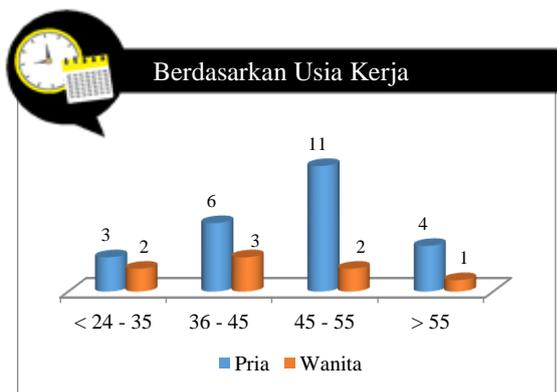
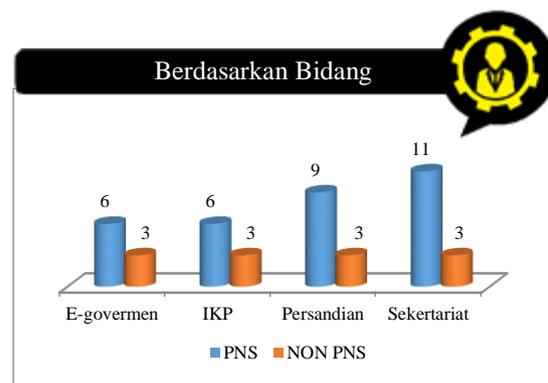
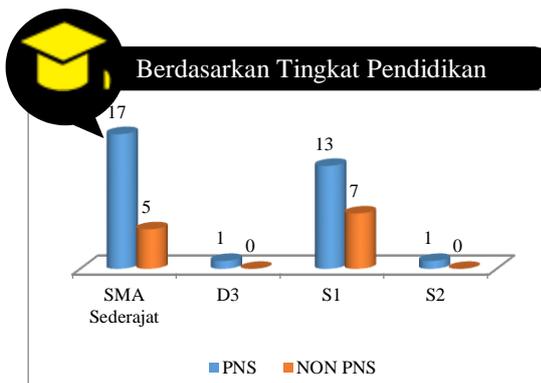
Sumber Daya Perangkat Daerah

Total Pegawai	PNS	Non PNS
	32	12
	23	1
	9	11

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 32 personil dengan rincian 10 orang adalah pejabat struktural dan sisanya sejumlah 22 orang staf serta pegawai Honorer sebanyak 12 orang. Jika melihat kuantitas SDM yang tersedia sampai dengan akhir Desember 2017, sangat dibutuhkan tenaga teknis, Operator computer serta tenaga IT.

Jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Maluku Tengah sarjana (S2) sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 21 orang, Diploma sebanyak 1 orang dan SMA sebanyak 21 orang.



Kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sampai saat ini belum ada tenaga di bidang IT, oleh karena itu sangatlah dibutuhkan sarjana teknis dibidang tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut : golongan II/a = 2 orang, II/b = 2 orang, II/c = 3 orang,

golongan III/a = 4 orang, III/b = 11 orang, III/c = 1 orang, III/d = 7 orang, Golongan IV/a = 1 orang, IV/c = 1 orang

Maksud & Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati Maluku Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama Tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian selama Tahun 2018, sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Permasalahan

Pemasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut;

1. Keterbatasan sumber daya aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika serta bidang persandian
2. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, informatika dan persandian
3. Masih terbatasnya ketersediaan regulasi daerah di bidang komunikasi dan informatika serta persandian.

Isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang akan dihadapi antara lain:

1. Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan Pemerintah Daerah harus berbasis elektronik dengan system aplikasi (misalnya: perijinan, pendapatan daerah, pengiriman Jasa surat menyurat dll) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

4. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat yang melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa akses yang kurang baik bagi masyarakat.

The background features a gradient from light blue to white. On the right side, there is a complex, glowing blue structure resembling a molecular model or a cluster of particles, with several bright blue points of light. Overlaid on this are several thin, glowing blue lines that form loops and curves across the page.

BAB 2
PERENCANAAN
KINERJA

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah sebagai Jendela Indonesia Bagian Timur

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022. Acuan peraturan diatas kemudian diterjemahkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2018. Dalam Renstra tersebut memuat penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022

Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022, dokumen Renstra merupakan pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan Pembangunan Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan kepala dinas No.13 tahun 2018 tentang rencana strategis Dinkominfo ditetapkan tujuan dan sasaran beserta terget kinerja sebagai berikut;

Tabel 2.1.

Tujuan, sasaran, indikator Tujuan dan sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017-2022

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Target Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran dalam Renstra Perangkat daerah					
		2017	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		3	4			7	8	9	10	11	12
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	11,98	19,50%	Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	Presentase publikasi informasi melalui media online	15,00	15,59	16,47	16,47	18,24	18,24
					Presentase e-government yang terintegrasi	15,38	23,08	15,38	15,38	15,38	15,38
					Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	7,07	11,11	20,20	16,16	21,21	24,24
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Predikat LAKIP	A	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah periode tahun 2017-2022 yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Selain itu, Renstra juga harus bisa menjawab tantangan dan permasalahan strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kendala geografis dan demografis yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan akses masyarakat terhadap informasi agar kebijakan yang diambil dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, sasaran, indikator Tujuan dan sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Tahun 2018
				Target
1		2		3
Tujuan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	1	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	16,79
Sasaran	Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	1.1	Presentase publikasi informasi melalui media online	15,59
		1.2	Presentase e-government yang terintegrasi	23,08
		1.3	Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	11,11
Tujuan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	2	Predikat LAKIP*	A
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	2.1	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100,00

Kinerja Lainnya

Pada bagian ini dijelaskan mengenai capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, namun tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, antara lain

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018

Kode	Indikator	Target kinerja 2018
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	56,00
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	77,00
10.3	Presentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	78,00
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	76,00
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi	77,00

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan prioritas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Rencana Strategis 2017-2022

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator
Visi	Mewujudkan Maluku Tengah Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dalam Semangat Orang Hidup Basudara	
Misi (3)	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;	
Tujuan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan
Sasaran	Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	1). Presentase publikasi informasi melalui media online 2). Presentase e-government yang terintegrasi 3). Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi
Program	1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer
Kegiatan	➤ Pengembangan/Operasional Radio Pemerintah Daerah	Jumlah penyiaran
	➤ Media Luar Ruang	Jenis media
	➤ ISP (Sewa Koneks Via Satelite) dan Sosialisasi Teknologi informasi dan Komunikasi	Jumlah kebutuhan bandwidth
	➤ Calling Mobil Unit	Layanan Informasi Publik
	➤ Pengembangan sistem jaringan komunikasi dan informatika	Jumlah Jaringan komunikasi dan informatika daerah
	➤ Peningkatan Kapasitas Sistem Server Kabupaten	Jumlah peralatan server
	➤ Pembuatan dan Penyusunan Data Center Kabupaten	Jumlah sistem data center yang tersedia
	➤ Pengembangan Web site Pemerintah daerah	Jumlah pengembangan Website
	➤ Sosialisasi Pembangunan E-Government Pemerintah Daerah	Jumlah Sosialisasi yang diadakan
	➤ Koordinasi dan Konsultasi Bidang pengembangan komunikasi dan informasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
	➤ Monitoring dan identifikasi Lokasi Telekomunikasi	Jumlah data lokasi BTS
	➤ Perawatan Jaringan dan Selvaer	jumlah perawatan jaringan
Program	2). Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang
Kegiatan	➤ Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Mengenai Jenis Informasi yang dikecualikan	Jumlah regulasi
	➤ Pembuatan Berita Pembangunan	Jumlah berita pembangunan daerah
	➤ Pelatihan Jurnalistik	Jumlah peserta pelatihan
	➤ Study topology jaringan komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen
Program	3). Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	
Kegiatan	➤ Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
	➤ Pers dan Peliputan	Jumlah Berita
Program	4). Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian
Kegiatan	➤ Koordinasi dan Konsultasi Sistem Persandian Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator
	➤ Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Persandian	Jumlah SD Aparatur yang memiliki kompetensi persandian
	➤ Tata Kelola Persandian Daerah	Tersedianya Laporan Tata Kelola Persandian
Program	5). Program Pengembangan Data/Informasi	Presentase peningkatan informasi komunikasi dan informatika
Kegiatan	➤ Pameran Pembangunan Daerah	Jumlah pameran yang diikuti
Program	6). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentase pembinaan dan pengembangan aparatur
Kegiatan	➤ Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah instrumen analisis jabatan PNS yang terselesaikan
	➤ Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	Jumlah administrasi pegawai yang diselesaikan tepat waktu
Misi (4)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	
Tujuan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Predikat LAKIP OPD
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
Program	1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
Kegiatan	➤ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar
	➤ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa pelayanan
	➤ Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian
	➤ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis barang kebersihan kantor
	➤ Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor
	➤ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan
	➤ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah surat kabar dan buku peraturan
	➤ Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minum
	➤ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi
	➤ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi
	➤ Rapat Form SKPD	Jumlah peserta rapat forum SKPD
	➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
	➤ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
	➤ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor
	➤ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor
	➤ Pengadaan Mebeleur	Jumlah kebutuhan Meubelir
	➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara
	➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
	➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
Program	2). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan SD Aparatur
Kegiatan	➤ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimbingan Teknis
Program	3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP
Kegiatan	➤ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD
	➤ Evaluasi Renstra	Laporan Evaluasi RENSTRA
	➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan

The background features a dynamic, abstract composition of flowing, translucent shapes in shades of orange, yellow, and red. These shapes overlap and curve, creating a sense of movement and depth. The colors transition from bright yellow and orange in the upper left to deeper reds and oranges in the lower right and center. The overall effect is vibrant and modern.

BAB 3
AKUNTABELITAS
KINERJA

BAB 3

AKUNTABELITAS KINERJA

“**Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun**”

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk mendukung pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis DINKOMINFO digambarkan sebagai berikut;

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Tujuan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	1 Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	14,66	8,57	58,45
Sasaran Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	1.1 Presentase publikasi informasi melalui media online	15,59	15,29	98,11
	1.2 Presentase e-government yang terintegrasi	13,85	10,77	77,78
	1.3 Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	15,00	3,00	20,00
Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan	2 Predikat LAKIP*	A	A	100,00
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	2.1 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00

*) Perkiraan hasil SAKIP

Penjelasan atas Metode perhitungan atas pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis secara rinci sebagai berikut:

Pencapaian Tujuan 1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik dengan indikator ukur keberhasilan yaitu Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan. alat ukur keberhasilan ini merupakan wujud dari pencapaian indikator sasaran antara lain; Presentase publikasi informasi melalui media online; Presentase e-government yang terintegrasi dan Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi.

Pencapaian Tujuan 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan ukuran keberhasilan Nilai Predikat LAKIP* dengan salah satu ukuran keberhasilan dari sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Rumusan Perhitungan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran digunakan adalah sebagai berikut;

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Bobot Kinerja
1		2		3
Tujuan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	1	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	100

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Bobot Kinerja
1		2		3
Tujuan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	1	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	100
Sasaran	Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	1.1	Presentase publikasi informasi melalui media online	20
		1.2	Presentase e-government yang terintegrasi	40
		1.3	Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	40
Tujuan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	2	Predikat LAKIP*	A
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	2.1	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100,00

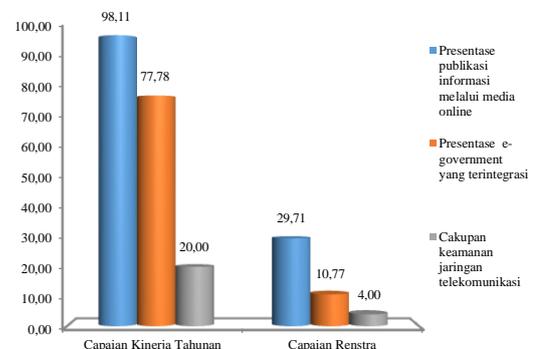
*) Perkiraan hasil SAKIP

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian Kinerja Tujuan1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik dengan indikator kinerja.

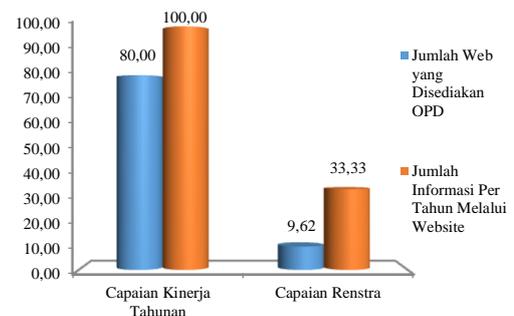
Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan (11,86%)

Untuk Mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah Sebagai Salah Satu Kabupaten IT di Indonesia tentunya masih memerlukan banyak hal yang perlu dipersiapkan diantaranya sarana dan prasarana infrastruktur serta sumberdaya manusia dibidang jaringan maupun pengembangan sistem komunikasi dan informatika yang memadai hal ini dapat digambarkan sebagai berikut;



a. Presentase publikasi informasi melalui media online (98,11%)

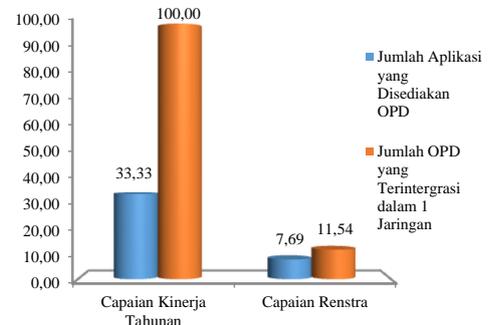
Ada dua hal yang menjadi perhatian dan penilaian DISKOMINFO dalam kaitannya dengan Publikasi informasi melalui media online yaitu jumlah ketersediaan OPD lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam menyediakan Website dan jumlah informasi yang dipublikasikan adapun capaian kinerja



tahun dan dan capaian renstra dapat dilihat pada gambar 1. Capaian Kinerja Presentase Publikasi Informasi

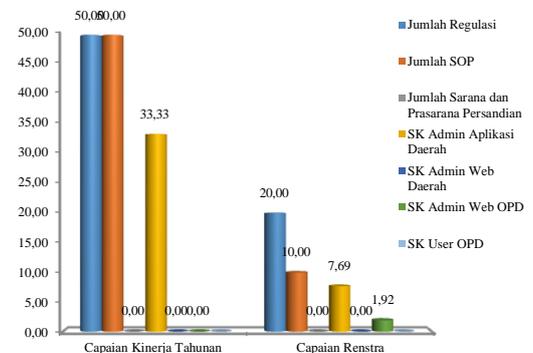
b. Presentase e-government yang terintegrasi (77,78%)

terdapat 2(dua) data sebagai dasar perhitungan capaian kinerja yaitu; 1) jumlah fasiltasi aplikasi yang terintergrasi dan jumlah opd yang terintegrasi dalam 1 jaringan daerah. Adapun capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 2. Presentase e-govermen terintegrasi



c. Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi (20,00%)

untuk menjawab kinerja cakupan keamanan jaringan telekomunikasi digunakan 7 informasi ketersediaan data yang antarlain; jumlah regulasi bidang komunikasi informatika dan bidang persandian; jumlah sop yang digunakan; jumlah sarana dan prasarana persandian; SK admin aplikasi daerah; SK admin Website daerah dan OPD; SK User OPD



Capaian Kinerja Tujuan 2. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan** dengan indikator kinerja Predikat LAKIP* (A)

Dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, adapun indikator kinerja beserta target kinerja tahun 2018 adalah Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (100%)

Realisasi atas capaian kinerja Tujuan 2 diperkirakan predikat lakip Diskominfo bernilai “A” dengan capaian kinerja sasaran (100%)

Selain target kinerja Rencana Strategis DISKOMINFO terdapat Rencana kinerja urusan bidang komunikasi dan informatika sebagai penjabaran dari target kinerja VISI dan MISI Kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017-2022 yang dijabarkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 sebagai berikut :

Kode	Indikator	Tahun 2018		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	56,00	50,00	89,29
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	77,00	76,00	98,70
10.3	Presentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	78,00	74,00	94,87
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	76,00	75,00	98,68
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi	77,00	75,00	97,40

Diskominfo dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dalam pelaksanaan pembangunan daerah VISI dan MISI Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022 terdapat 4 (empat) indikator pembangunan daerah antaralain;

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan.
Pada tahun 2018 capaian atas indikator sebesar 89,29% dengan realisasi 50% dari target sebesar 56%.
2. Cakupan Layanan Telekomunikasi; capaian atas indikator ini sebesar 98,70% dengan realisasi sebesar 76% dari target sebesar 77%.
3. Presentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon; capaian atas indikator sebesar 94,87% dengan realisasi sebesar 74% dari target 78%.
4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet; capaian sebesar 98,68% dengan realisasi sebesar 75% dari target 76%.
5. Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi; capaian atas indikator ini sebesar 97,4% dengan realisasi sebesar 75% dari target 77%.

Permasalahan belum tercapainya target atas 4 (empat) indikator pembangunan daerah disebabkan disebabkan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur informasi dan komunikasi di tingkat kecamatan dan masih terdapat wilayah dikabupaten yang masih blanksport (belum ada maupun kondisi infrastruktur komunikasi berstatus lemah)



3.2. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.5.454.860.491,- atau 98,42% dari Pagu DPA sebesar Rp.5.542.187.000,-. Dengan rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.776.859.549,- atau 104,40% dari pagu Rp.2.659.742.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.678.000.942,- atau 92,91% dari pagu anggaran Rp.2.882.445.000,-. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
PENDAPATAN	0	0	0,00
BELANJA	5.542.187.000	5.454.860.491	98,42
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.659.742.000	2.776.859.549	104,40
Belanja Pegawai	2.659.742.000	2.776.859.549	104,40
BELANJA LANGSUNG	2.882.445.000	2.678.000.942	92,91
Belanja Pegawai	113.120.000	110.420.000	97,61
Belanja Barang dan Jasa	2.353.987.000	2.170.810.942	92,22
Belanja Modal	415.338.000	396.770.000	95,53

Laporan Keuangan Diskominfo

Adapun realisasi belanja masing-masing program dan secara rinci diuraikan sebagai berikut:

KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TAR GET	ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	
					TARGET	REALISASI	KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10. 2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	485.540.000	468.911.657	96,58	100,00
2.10. 2.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Tahun	1	1.680.000	1.680.000	100,00	100,00
2.10. 2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa pelayanan	Tahun	1	36.000.000	30.818.657	85,61	100,00
2.10. 2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis barang kebersihan kantor	Tahun	1	28.360.000	28.360.000	100,00	100,00
2.10. 2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	30	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
2.10. 2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	Tahun	1	14.500.000	14.438.000	99,57	100,00
2.10. 2.10.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah surat kabar dan buku peraturan	Jenis	2	15.000.000	12.750.000	85,00	100,00
2.10. 2.10.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minum	Tahun	1	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
2.10. 2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat koordinasi luar daerah	Tahun	1	175.000.000	166.630.000	95,22	100,00

KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TAR GET	ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	
					TARGET	REALISASI	KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10. 2.10.01. 01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rapat koordinasi dalam daerah	Tahun	1	185.000.000	184.235.000	99,59	100,00
2.10. 2.10.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	30	467.263.000	448.300.000	95,94	100,00
2.10. 2.10.01. 02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	2	49.227.000	41.227.000	83,75	100,00
2.10. 2.10.01. 02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Jenis	5	24.379.000	21.499.000	88,19	100,00
2.10. 2.10.01. 02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor	Jenis	10	166.355.000	162.297.000	97,56	100,00
2.10. 2.10.01. 02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah kebutuhan Meubelier	Jenis	5	174.777.000	171.147.000	97,92	100,00
2.10. 2.10.01. 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	1	27.525.000	27.130.000	98,56	100,00
2.10. 2.10.01. 02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Unit	5	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
2.10. 2.10.01. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan SD Aparatur	%	25	50.000.000	48.905.285	97,81	100,00
2.10. 2.10.01. 05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	3	50.000.000	48.905.285	97,81	100,00
2.10. 2.10.01. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	A	33.740.000	33.740.000	100,00	100,00
2.10. 2.10.01. 06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	33.740.000	33.740.000	100,00	100,00
2.10. 2.10.01. 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer	%	20	1.087.931.500	996.388.000	91,59	100,00
2.10. 2.10.01. 15.12	Media Luar Ruang	Jenis media	Jenis	2	45.787.000	45.780.500	99,99	100,00
2.10. 2.10.01. 15.15	ISP (Sewa Koneks Via Satelite) dan Sosialisasi Teknologi informasi dan Komunikasi	Jumlah kebutuhan bandwidth	Tahun	1	777.106.500	773.403.500	99,52	100,00
2.10. 2.10.01. 15.23	Calling Mobil Unit	Layanan Informasi Publik	Bulan	12	11.556.000	10.556.000	91,35	100,00
2.10. 2.10.01. 15.30	Peningkatan Kapasitas Sistem Server Kabupaten	Jumlah peralatan server	Buah	1	114.430.000	46.437.000	40,58	100,00
2.10. 2.10.01. 15.31	Pembuatan dan Penyusunan Data Center Kabupaten	Jumlah sistem data center yang tersedia	System	1	139.052.000	120.211.000	86,45	100,00
2.10. 2.10.01. 16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang	%	30	304.880.500	281.471.000	92,32	100,00
2.10. 2.10.01. 16.05	Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Mengenai	Jumlah regulasi	Regulasi	1	53.740.000	42.579.000	79,23	100,00

KODE	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TAR GET	ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	
					TARGET	REALISASI	KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jenis Informasi yang dikecualikan							
2.10. 2.10.01. 16.06	Pembuatan Berita Pembangunan	Jumlah berita pembangunan daerah	Laporan	1	124.610.500	124.610.500	100,00	100,00
2.10. 2.10.01. 16.07	Pelatihan Jurnalistik	Jumlah pelatihan	Kali	1	126.530.000	114.281.500	90,32	100,00
2.15. 2.10.01. 15	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	%	10	107.109.500	107.109.000	100,00	100,00
2.15. 2.10.01. 15.01	Koordinasi dan Konsultasi Sistem Persandian Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Bulan	12	107.109.500	107.109.000	100,00	100,00
2.15. 2.10.01. 16	Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Persandian	Persentase Peningkatan Standar Layanan persandian	%	100	325.980.500	273.176.000	83,80	100,00
2.15. 2.10.01. 16.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Persandian	Jumlah Sumber daya aparatur persandian yg sesuai kompetensi	Orang	15	231.560.000	188.438.500	81,38	100,00
2.15. 2.10.01. 16.02	Tata Kelola Persandian Daerah	Laporan tata kelola persandian	Laporan	1	94.420.500	84.737.500	89,74	100,00
4.03. 2.10.01. 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Presentase pamaren yang diikuti	%	100	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
4.03. 2.10.01. 15.30	Pameran Pembangunan Daerah	Pameran yang diikuti	Kali	1	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
T o t a l					2.882.445.000	2.678.000.942	92,91	100,00